

# KEBIJAKAN KELEMBAGAAN USAHA UNGGAS TRADISIONAL SEBAGAI SUMBER EKONOMI RUMAH TANGGA PERDESAAN : *Kasus Peternakan Burung Puyuh Yogyakarta*

## *Traditional Poultry Farm Institutional Policy as the Source of Smallholders' Income in Rural Areas: A Case of the Quail Farms in Yogyakarta*

Iwan Setiajie Anugrah<sup>1)</sup>, Ikin Sadikin<sup>2)</sup>, dan Wahyuning K Sejati<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup>Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Bogor

<sup>2)</sup>Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Jawa Barat

### ABSTRACT

Rural economy empowerment through smallholding poultry farm business is carried out by the quail breeders' community in Yogyakarta. Quail farms are less popular and the regional government does not regard them as the economic growth driving force and one of regional income sources. The farms are conducted through self-supporting or partnership business and it offers satisfactory income to the breeders in accordance with the scales. Supports committed by many parties strengthen the quail farms before and after Avian Influenza (AI) outbreak. Many quail breeders experienced losses and got bankrupt due to AI outbreak. All related parties have to participate to revitalize the quail farms such that they could running their business again. Discussion on institutional aspect in this paper is expected to contribute to refreshing the smallholding quail farms as the rural economic basis.

**Key words :** *poultry, quail, rural economy*

### ABSTRAK

Usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat perdesaan melalui usaha peternakan skala rumah tangga yang dilakukan oleh komunitas peternak puyuh di DI Yogyakarta, merupakan salah satu contoh bagi aktivitas masyarakat yang dapat menggerakkan perekonomian perdesaan. Pengetahuan masyarakat dan pemerintah terhadap kegiatan usaha ternak ini masih terbatas, sehingga dianggap masih belum merupakan potensi usaha bagi percepatan pertumbuhan ekonomi maupun sumber pendapatan daerah. Padahal usaha ini telah memberikan peluang usaha rumah tangga yang potensial disamping sebagai salah satu sumber perekonomian masyarakat. Pola usaha ternak dilakukan baik secara mandiri maupun kemitraan dengan segala kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pola tersebut. Partisipasi kelembagaan dari seluruh aspek, telah menjadikan usaha ternak puyuh berkembang menjadi sebuah alternatif kegiatan yang memberikan penghasilan sesuai dengan skala usaha yang dilakukan. Dukungan pihak terkait juga sangat berperan dalam perkembangan usaha skala rumah tangga ini menjadi basis perekonomian masyarakat di perdesaan baik sebelum maupun sesudah terjadinya serangan wabah *Avian Influenza (AI)*. Adanya serangan virus *Avian Influenza (AI)* tersebut kemudian menjadi salah satu penyebab utama yang mengakibatkan kerugian materi yang cukup besar dalam usaha

ternak puyuh serta ternak unggas. Para peternak rakyat akhirnya banyak yang mengalami kegagalan usaha bahkan berhenti menjadi peternak puyuh. Peran serta semua pihak dalam usaha mendorong kembali usaha peternakan puyuh pasca serangan AI harus menjadi agenda utama agar kegiatan usaha peternakan rakyat kembali berproduksi sebagaimana kondisi sebelum terjadinya serangan *virus Avian Influenza*. Aspek dan bahasan tentang kelembagaan yang terkait dengan usaha ternak puyuh diharapkan dapat menjadi dasar bagi penumbuhan kembali usaha peternakan rakyat sebagai basis perekonomian di perdesaan.

**Kata kunci :** *unggas, burung puyuh, ekonomi perdesaan*

## PENDAHULUAN

Kegiatan usaha peternakan burung puyuh secara tradisional, pada lima tahun terakhir ini terus berkembang di tengah dominasi perkembangan agribisnis peternakan ayam ras yang secara intensif dilakukan di setiap daerah di wilayah Indonesia. Walaupun kegiatan peternakan puyuh secara nasional tidak sebesar dan se-intensif usaha peternakan lainnya, namun kegiatan usaha ini telah menjadi salah satu kegiatan usaha alternatif yang cukup potensial. Peternakan puyuh dapat dijadikan sebagai usaha permanen maupun sambilan yang memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat atau para peternak yang mengusahakannya.

Data dan perkembangan populasi serta usaha ternak puyuh relatif sulit ditemukan dalam data BPS ataupun data dari laporan Dinas instansi terkait di tingkat provinsi serta tingkat kabupaten. Hanya beberapa kabupaten tertentu, yang secara terbatas telah mencoba untuk mendokumentasikannya dalam bentuk data dukung internal. Dengan keterbatasan data dan informasi tentang populasi dan sebaran usaha yang dilakukan, usaha peternakan puyuh tidak banyak diketahui dalam kesatuan komunitas usaha peternakan unggas secara umum. Demikian juga dengan informasi-informasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha ternak puyuh di tingkat masyarakat maupun di antara institusi yang terkait dengan usaha peternakan relatif masih terbatas. Hal ini mungkin ternak puyuh dianggap belum menjadi komoditas prioritas untuk ditangani. Kegiatan usaha ternak puyuh kurang mendapat perhatian karena umumnya dilakukan dengan skala usaha yang relatif kecil-kecil.

Sebenarnya usaha ternak puyuh telah banyak dilakukan sebagian peternak rakyat dan secara umum masih dilakukan secara tradisional, serta menjadi sumber pendapatan rumah tangga terutama di perdesaan. Dari beberapa informasi (Poultry Indonesia, 2002; 2004; 2005), memberikan gambaran bahwa selama periode tiga tahun sebelumnya, usaha ternak puyuh telah berkembang di beberapa daerah, seperti di beberapa lokasi kabupaten di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur bahkan hingga ke Provinsi DI Aceh. Usaha ternak puyuh juga diusahakan di beberapa lokasi kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam perkembangan selanjutnya terjadi fluktuasi jumlah lokasi usaha peternakan, akibat adanya wabah

virus *Avian Influenza (AI)* yang banyak menyerang usaha ternak puyuh di beberapa lokasi usaha peternakan.

Kondisi ini juga telah berdampak pada kegiatan usaha ternak puyuh yang dilakukan oleh beberapa rumah tangga di DI Yogyakarta, dimana hampir sebagian besar peternak lebih memilih berhenti melakukan usaha akibat terjadinya wabah flu burung tersebut. Namun demikian banyak juga rumah tangga yang memulai kembali usaha ternak puyuh tersebut, baik dilakukan secara mandiri maupun dengan pola kerjasama melalui kelembagaan kemitraan yang ada disekitar peternak.

Tulisan ini bertujuan untuk memberi gambaran tentang usaha ternak puyuh dilakukan melalui sistem dan kebijakan kelembagaan yang dijalankan para peternak maupun mitra selama ini. Dengan gambaran kinerja kelembagaan yang dipaparkan dari tulisan ini diharapkan dapat mendorong suatu pemikiran, bagaimana upaya menumbuhkan kembali iklim usaha peternakan puyuh yang kondusif, sehingga bisa menguntungkan semua pihak seperti kondisi semula. Dengan demikian, secara bertahap usaha ternak tersebut kembali menjadi sumber perekonomian masyarakat di perdesaan.

## KONDISI USAHA PETERNAKAN

### Produksi Puyuh

Berdasarkan karakteristiknya, burung puyuh merupakan sejenis burung liar, dalam istilah asing disebut *quail* atau di Indonesia, khususnya di Jawa puyuh lebih dikenal dengan nama *gemak*. Burung puyuh mulai dikenal dan ditenakkan di Indonesia pada akhir tahun 1979, dan sebelumnya puyuh juga mulai berhasil ditenakkan di Amerika Serikat pada tahun 1870 dan terus berkembang menyebar ke seluruh dunia (Agromedia, 2002; Poultry Indonesia, 2002).

Berdasarkan catatan Poultry Indonesia (2004), burung puyuh telah lama dipelihara peternak, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Usaha ternak puyuh di Jawa, dipelihara untuk diambil telurnya. Di Malaysia, burung puyuh yang dipelihara adalah dari jenis ternak untuk diambil dagingnya. Namun demikian, baik di Indonesia maupun di Malaysia jenis burung puyuh yang dipelihara adalah jenis *Coturnix javonica*, sementara di Amerika burung puyuh yang dipelihara adalah jenis *Bob White Quail*, *Colinees Virgianus*, sedangkan di negara China dari jenis *Blue Breasted Quail*, *Coturnix Chinesis*.

Lebih lanjut dikemukakan (Poultry Indonesia, 2005 dan Agromedia, 2002) bahwa kandungan gizi dari daging burung puyuh tidak berbeda dengan unggas lain. Berdasarkan hasil analisis komposisi kimia di laboratorium, daging burung puyuh mengandung air 73,2 persen; protein 22,5 persen; lemak 2,5 persen;

dan abu 0,94 persen. Daging puyuh juga mengandung asam lemak omega yang lengkap, yaitu omega 3,6 dan 9 serta EPA dan DHA. Namun demikian kandungan gizi daging puyuh akan berubah dengan cara pemasakan. Penelitian Sutanto *dalam* Poultry (2004), menunjukkan bahwa persentase kandungan gizi terutama protein dan lemak daging burung puyuh meningkat setelah digoreng menjadi 47,7 persen protein dan 10,5 persen lemak, dengan kadar air 31,1 persen.

Selain diambil dagingnya, ternak puyuh juga merupakan sumber dari produk telur yang selama ini telah banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Telur dalam kaitannya dengan usaha peternakan puyuh di Indonesia, merupakan produk utama yang dihasilkan dan dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Kandungan gizi dari telur puyuh juga tidak kalah dengan kandungan gizi dari telur ternak lainnya, dimana telur puyuh mempunyai kandungan protein 13,1 persen, lemak 11,1 persen serta karbohidrat 1,0 persen. Dengan demikian secara teknis dan morfologis, ternak puyuh mempunyai potensi untuk menjadi sumber kegiatan peternakan unggas yang bisa diusahakan oleh para pelaku usaha peternakan baik di tingkat produksi, pemasaran serta usaha lain yang terkait, sebagaimana usaha peternakan lainnya (Poultry Indonesia, 2002, 2005; Agromedia, 2002; Hartono, 2004).

### **Struktur Kelembagaan Usaha**

Berdasarkan temuan di tingkat lapang, usaha ternak puyuh dilakukan melalui sistem kerjasama antara plasma dan inti serta secara mandiri. Pada usaha ternak puyuh yang dilakukan secara mandiri, hampir semua variabel input maupun pemasaran hasil ternak semata-mata dilakukan dengan mandiri dimana selain peternak menyediakan modal sendiri, juga secara langsung peternak mengelola usaha peternakan puyuh secara sendiri, termasuk mencari pasar untuk pemasaran hasil produk ternaknya dalam satu kali proses produksi. Bagi peternak mandiri, segala biaya usaha yang meliputi pembelian bibit (DOQ), pakan, obat-obatan serta fasilitas kandang dipenuhi dengan modal sendiri. Begitu pula dalam penentuan proses usaha maupun pemasaran hasil dari usaha ternak yang dilakukan.

Sementara itu, pada usaha peternakan dengan pola setengah kemitraan (kerjasama), peternak menyediakan semua input produksi. Untuk pemasaran produk peternakan yang dihasilkan, baik telur maupun daging afkir atau daging puyuh jantan, peternak melakukan kerjasama dengan pedagang P1. Ikatan kerjasama pemasaran biasanya juga sangat terkait dengan pemenuhan pakan ternak dari pedagang ke peternak sehingga kontinuitas kebutuhan pakan peternak tetap terjaga. Namun kerjasama tersebut sifatnya tidak mengikat diantara dua pelaku sehingga sewaktu-waktu bisa berubah sesuai dengan kehendak masing-masing pelaku. Begitu pula dengan penentuan harga jual produk yang dipasarkan oleh peternak ke pedagang sepenuhnya berdasarkan harga yang berlaku di pasaran, sehingga tidak merugikan peternak maupun pedagang yang memasarkan ke P2. Demikian pula dengan input yang ditawarkan ke peternak baik pakan

maupun obat-obatan diberlakukan dengan harga pasar, hanya sistem pembayarannya saja yang bisa disepakati terutama berkaitan dengan waktu pembayaran.

Bagi para peternak setengah kemitraan ataupun peternak mandiri dalam pemenuhan bibit dilakukan secara bebas. Artinya bibit bisa diperoleh dari peternak lain, lembaga pembibitan ataupun dari *poultry shop* yang menyediakan bibit puyuh. Sebagian besar peternak mendapatkan bibit dari perusahaan pembibitan yang ada. Untuk peternak mandiri, pemenuhan kebutuhan dan input maupun pemasaran hasil sepenuhnya dilakukan dengan mandiri dan pembelian input dilakukan secara kontan. Sistem kemitraan ataupun kerjasama hanya terbatas pada tukar menukar pengalaman diantara peternak khususnya dalam kerjasama pembelian bibit DOQ bagi peternak pemula serta dalam proses pemeliharaan awal hingga pada masa bertelur.

Kebutuhan sarana produksi bagi para peternak di wilayah DI Yogyakarta, sepenuhnya dipenuhi dari beberapa toko sapronak (*poultry*) terdekat. Sementara kebutuhan untuk bibit yang telah melakukan usaha ternak lebih dari satu periode usaha, biasanya dipenuhi dari hasil usaha penetasan bibit sendiri. Bagi peternak pemula sebagian besar membeli bibit (DOQ) dari para peternak yang melakukan pembibitan usaha penetasan atau penyedia bibit perorangan bahkan dilakukan kepada peternak yang telah melakukan pembinaan selama pemeliharaan awal hingga bertelur.

Skala usaha peternakan puyuh di DIY secara umum relatif beragam antara 100 ekor atau kurang hingga di atas 10.000 ekor. Tetapi sebagian besar usaha peternakan masih bersifat sederhana dengan rata-rata populasi ternak di bawah 5.000 ekor. Sekalipun demikian terdapat beberapa peternak yang telah melakukan usaha peternakan di atas populasi tersebut dan biasanya merupakan petani maju yang mempunyai modal yang cukup besar. Struktur usaha peternakan puyuh juga telah dilakukan dalam bentuk perusahaan, seperti yang dirintis oleh pihak swasta melalui usaha kemitraan dengan sejumlah peternak di sekitar DIY maupun di beberapa wilayah di Jawa Tengah.

Pola kemitraan yang ditawarkan oleh swasta meliputi kemitraan murni, semi kemitraan dan non kemitraan atau di tingkat peternak lebih dikenal dengan kemitraan murni, kemitraan semi plus, semi kemitraan serta non kemitraan. Kemitraan murni adalah usaha kerjasama dimana segala input diperoleh dari mitra. Plasma hanya memelihara dan menyediakan kandang. Sistem pengembalian input dilakukan dengan perbandingan 70:30, yang dihitung dari pendapatan hasil penjualan telur kepada inti. Harga telur ditentukan melalui kontrak, begitu pula dengan harga pakan per periode. Harga kontrak juga berlaku bagi penjualan ternak afkir yang dibeli kembali oleh Inti. Jumlah populasi ternak yang ditawarkan antara 4.000 – 5.000 ekor, sehingga peternak yang melakukan kemitraan relatif terseleksi dan mempunyai jaminan antara 3-4 persen dari jumlah modal yang ditawarkan dan tidak mendapatkan insentif.

Kemitraan lain yang ditawarkan, adalah kemitraan semi plus, dimana inti hanya meminjamkan pakan kepada plasma dengan syarat-syarat adanya loyalitas, tetapi model perandangan bebas asalkan produksi serta kualitas tetap terjaga. Sistem pengembalian sama seperti kemitraan murni dengan perbandingan 70:30. Jika pendapatan dari peternak terjadi minus akibat pendapatan/produksi telur rendah, maka akan diperhitungkan antara pendapatan pada saat setoran telur mengalami surplus. Aturan lain disebutkan bahwa plasma harus mengikuti peraturan pengambilan telur 3 kali seminggu. Produk telur harus bagus dengan standar minimal dan ditetapkan melalui kontrol pengendalian produksi telur yang diperhitungkan dari 50 kg pakan harus menghasilkan 1.700 butir telur per hari selama masa/umur produksi 12 bulan dengan perhitungan pada saat 0-60 hari sudah memasuki masa mulai bertelur. Dengan kata lain, satu kelompok minimal dapat menghasilkan 75.000 butir per minggu dengan populasi 15.000 ekor untuk 15 orang peternak. Subsidi kelompok diperoleh dari pembelian telur sebesar Rp 1 per butir serta harga pakan dikurangi Rp 500 per sak untuk kas kelompok, disamping subsidi kepada lingkungan dimana kelompok ternak berada.

## Struktur Produksi

Secara umum pola usaha peternakan puyuh yang ditujukan untuk menghasilkan telur sebagai produk utama. Pola usaha untuk menghasilkan puyuh pedaging secara khusus nampaknya masih menjadi usaha sampingan. Usaha yang mengarah pada produk puyuh pedaging biasanya hanya merupakan bagian dari sebuah siklus pemeliharaan dalam 1 *flok* usaha ternak ataupun dari satu tahun pemeliharaan. Jumlah populasi puyuh pedaging biasanya berasal dari puyuh jantan terutama hasil penetasan atau seleksi bibit (DOQ) yang dibesarkan, bisa juga dari puyuh afkir atau puyuh-puyuh yang secara berkala mengalami penyortiran produktivitas maupun tingkat kesehatannya.

Sebagian besar peternak di DIY, dalam pemenuhan bibit DOQ lebih banyak membeli dari mitra atau perusahaan pembuat bibit yang cukup modern dengan dukungan fasilitas peralatan mesin *hatchery* yang dapat memproduksi bibit dalam kapasitas besar. Dengan peralatan modern ini secara kuantitas jumlah bibit yang diperlukan peternak tersedia dan mudah diperoleh dengan harga yang relatif cukup murah dibandingkan di beberapa tempat lain serta dengan kualitas yang lebih terjamin. Para produsen pembibitan DOQ, selain menjual bibit juga menyediakan waktu untuk pembimbingan tata cara budidaya yang baik secara cuma-cuma, terutama pada fase pemeliharaan DOQ hingga umur bertelur, sekaligus sebagai bentuk pelayanan purna jual bagi para peternak yang membeli DOQ.

Peningkatan produk usaha ternak puyuh selain dari telur juga daging puyuh baik yang berasal dari ternak jantan juga hasil puyuh afkir. Permintaan

produk daging puyuh di DIY di pasar-pasar lokal, warung-warung lesehan serta supermarket nampaknya cukup besar per harinya. Bentuk produk daging puyuh dan dijual cukup beragam, seperti puyuh bacem, puyuh goreng, puyuh bakar, abon puyuh serta jenis masakan lainnya. Sementara untuk pemenuhan konsumsi telur lokal diperuntukkan sebagai bahan makanan olahan, seperti sate telur puyuh, telur kupas, telur rebus, sarang burung, martabak telur atau dadar telur yang banyak dikonsumsi oleh anak-anak sekolah. Peningkatan permintaan produk telur puyuh terjadi pada saat-saat perayaan pernikahan/hajatan atau menjelang hari-hari raya.

## **ANALISIS STRUKTUR USAHA DAN FINANSIAL**

### **Analisis Kelayakan Finansial**

Analisis finansial (rata-rata) yang ditampilkan dalam Tabel 1 berikut, memberikan gambaran tentang hasil analisis usaha ternak puyuh selama setahun oleh peternak responden di beberapa wilayah penelitian. Dari hasil analisis usaha ternak puyuh yang disajikan dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa secara agregat (nasional) dengan rata-rata populasi 1.919 ekor, memperoleh nilai produksi rata-rata sebesar Rp.50.719.300. Di D.I Yogyakarta nilai produksi rata-rata yang diperoleh dari usaha ternak puyuh dengan masing-masing jumlah populasi rata-rata 2.373 ekor mencapai Rp 56.434.410 per tahun.

Sementara jumlah biaya yang dikeluarkan dalam satu kali proses usaha (dalam 1 tahun produksi) meliputi biaya untuk bibit, pakan, biaya kandang dan peralatan, tenaga kerja luar keluarga serta biaya lainnya (bahan bakar, listrik, telepon, transport, kompensasi serta biaya keperluan lainnya) yang berkaitan dengan usaha ternak puyuh yang dilakukan. Informasi tentang besaran biaya tersebut, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.

Hasil analisis usaha ternak menunjukkan bahwa secara agregat (nasional) diperoleh pendapatan rata-rata (tanpa TK-DK) Rp 16.051.650 per tahun pada saat rata-rata populasi 1.919 ekor. Pendapatan rata-rata yang diperoleh dari usaha ternak puyuh di DIY mencapai Rp 10.781.450. Biaya rata-rata per ekor ternak puyuh yang diusahakan untuk lokasi nasional sebesar Rp 19.520 per ekor/tahun, sedangkan di lokasi kajian DIY sebesar Rp 19.240 per ekor per tahun.

Untuk rincian pendapatan per bulan rata-rata Rp 1.104.200 (nasional) dan Rp 898.450 (DIY). Secara nasional persentase kebutuhan pakan dalam satuan siklus usaha ternak rata-rata mencapai 79,84 persen atau lebih rendah dibanding di DIY yang mencapai 85,73 persen, sehingga sangat mempengaruhi terhadap besarnya jumlah pendapatan rata-rata yang diterima oleh masing-masing peternak di wilayah tersebut. Besarnya pendapatan per hari rata-rata di DIY mencapai Rp 29.540, sementara dari nilai pendapatan rata-rata nasional sebesar Rp 36.300.

Tabel 1. Hasil Analisis Usaha Ternak Puyuh Rata-rata per Tahun (dalam Rp 000) Tahun 2006

Uraian	Lokasi Penelitian	
	DIY	Nasional
1. Nilai produksi rata-rata	56434,41	50719,30
2. Populasi rata-rata (ekor)	2373,11	1919,25
3. Biaya-biaya rata-rata:		
a. Bibit	2247,44	2060,05
b. Pakan	39137,38	29915,11
c. Kandang dan peralatan	1251,19	1177,28
d. TK luar keluarga	80,33	712,66
e. TK dalam keluarga	2585,00	2801,25
f. Biaya lainnya	351,62	802,55
4. Total biaya rata-rata	45652,96	37468,90
5. Pendapatan rata-rata	10781,45	13250,40
6. Pendapatan rata-rata tanpa TK-DK	13366,45	16051,65
7. Biaya rata-rata (total) per ekor	19,24	19,52
8. Pendapatan rata-rata per bulan	898,45	1104,20
9. Pendapatan rata-rata per minggu	207,34	254,82
10. Pendapatan rata-rata per hari	29,54	36,30
11. R/C	1,24	1,35
12. B/C (Total)	0,24	0,35
13. B/C (Non TK-DK)	0,29	0,43
14. BEP	5958,05	4204,57

Sumber : Laporan Penelitian Model Pengembangan Kelembagaan Agribisnis Ternak Unggas Tradisional (2006)

Untuk menggambarkan kelayakan usaha peternakan yang dijalankan masyarakat di DIY maupun secara agregat, diperlihatkan oleh nilai analisis R/C rasio yang menunjukkan positif di atas 1,0, yaitu di DIY 1,24 serta secara agregat 1,35. Hal ini berarti bahwa usaha ternak puyuh di beberapa wilayah kajian di DIY serta di tingkat nasional layak diusahakan dan menguntungkan, karena setiap penanaman modal sebesar Rp 1 akan memperoleh hasil masing-masing Rp 1,24 serta Rp 1,35. Kemudian berdasarkan nilai BEP yang diperoleh, menunjukkan bahwa nilai BEP dari peternak di DIY mencapai Rp 5.958.050 serta agregat Rp 4.204.570. Hal ini memberikan indikasi bahwa usaha berternak puyuh tidak akan rugi jika pendapatan yang diperoleh masing-masing mencapai nilai sebesar BEP tersebut dengan jumlah populasi ternak seperti ditampilkan pada Tabel 1 di atas (Yusdja *et al.*, 2005).

Sementara itu, dalam usaha ternak puyuh secara finansial, memproduksi telur puyuh (usaha ternak puyuh-petelur) lebih menguntungkan daripada



memproduksi daging puyuh (usaha ternak puyuh-pedaging). Karenanya daging puyuh yang banyak di pasaran tradisional saat ini tidak dihasilkan dari jenis puyuh-pedaging, melainkan hasil dari produk sampingan ternak puyuh-petelur, berupa ternak afkiran dan puyuh pejantan.

Menurut informasi dari pihak perusahaan PG, biaya investasi total (biaya tetap, biaya variabel) untuk usaha ternak puyuh-petelur adalah mencapai sekitar  $\pm$  Rp.19.000 per ekor per periode (12 bulan) dengan penerimaan total (75% telur = 265 butir, plus ternak afkir) adalah sekitar  $\pm$  Rp.24.000 per ekor per periode, sehingga keuntungan usaha tersebut mencapai *surplus* sekitar  $\pm$  Rp.5.000 per ekor per periode.

Biaya investasi total (biaya tetap, biaya variabel) untuk usaha ternak puyuh-pedaging adalah  $\pm$  Rp. 3500 - 4.000 per ekor per periode (1 flox = 0,8 -12 bulan) dengan penerimaan total (karkas = 0,75-0,85 kg/ekor) adalah  $\pm$  Rp.1800-2000/kg/periode, sehingga keuntungan usaha tersebut adalah *minus*  $\pm$  Rp.200 sampai Rp.1000 per ekor per periode.

## Struktur Pasar Input

Struktur pasar input pada dasarnya dibentuk oleh para pelaku pasar input itu sendiri, semakin banyak pelaku yang mengusahakan/menyediakan input produksi yang dibutuhkan oleh para peternak di wilayahnya, maka harga input akan lebih kompetitif. Struktur pasar input bagi para peternak yang melakukan kerjasama kemitraan sepenuhnya dikendalikan oleh inti yang melakukan "monopoli" penyediaan input pakan bagi para peternak plasmanya melalui kontrak kerja. Hal ini selain mengganggu sumber dan struktur pasar input yang ada juga menyebabkan tingkat harga yang cukup tinggi bagi peternak plasma.

Struktur pasar input pakan bagi para peternak plasma nampaknya sudah diperhitungkan dalam sistem perolehan keuntungan inti sehingga menjadi satu sistem yang harus diterima oleh plasma. Hal ini terkesan bersifat monopoli sekalipun peternak juga diberi kebebasan dalam penentuan kebutuhan pakan dari beberapa produsen/pabrik pakan dengan beberapa merek produknya. Di tingkat lapang, berkaitan dengan ketersediaan pakan di pasaran relatif kompetitif antar produk (merek) pakan yang tersedia. Perbedaan harga relatif kecil sehingga peternak bisa memilih sesuai dengan tingkat kepercayaan peternak dan kecocokannya terhadap produktivitas ternak. Begitu pula untuk para peternak mandiri bisa lebih bebas memilih pakan yang tersedia di pasar. Namun demikian tingkat kepercayaan para peternak terhadap pemilihan jenis pakan juga sudah menjadi bagian dari perhitungan matang peternak, termasuk untuk menentukan sistem pembayarannya nanti jika tidak dilakukan dengan pembelian *cash*.

Pasar input lain seperti bibit, bagi peternak yang melakukan kerjasama dengan inti, lebih bersifat monopoli. Sebaliknya untuk peternak mandiri relatif lebih bebas dalam upaya pembelian jenis bibit yang dibutuhkannya. Secara umum

klasifikasi bibit yang baik memang relatif terbatas dan konsekuensi harga relatif lebih tinggi dari bibit biasa yang berasal dari hasil produk penetasan sendiri atau tradisional, disamping terdapat kelebihan lain dalam pelayanan purna jual yang diperlukan oleh peternak. Dengan demikian, struktur pasar input bibit lebih kompetitif dan beragam jenis maupun jumlah penyedia bibit itu sendiri di masing-masing wilayah penelitian, tinggal tergantung pada kemampuan konsumen/peternak yang menentukannya.

Struktur pasar input yang terjadi di setiap wilayah telah berjalan mengikuti mekanisme pasar secara umum terutama di tingkat kecamatan yang dianggap sebagai sumber untuk pemenuhan kebutuhan para peternak unggas. Pada umumnya peternak sudah memperhitungkan letak lokasi usahanya dengan keberadaan pasar input yang diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan ternaknya selama proses usaha dijalankan.

## **STRUKTUR KELEMBAGAAN : *Belajar dari Pengalaman***

### **Kelembagaan Produksi**

Produksi puyuh terbentuk sekurang-kurangnya melalui enam kelembagaan, yaitu adanya : (1) Produsen bibit (termasuk di dalamnya pengimpor telur/ternak puyuh *strain* tertentu dari Prancis dan AS untuk dijadikan sebagai *Parent/Grand Parent Stock*), (2) Produsen pakan dan obat, (3) Pedagang sapronak, (4) Pedagang hasil produksi, (5) Petani ternak puyuh, dan (6) Sarana/prasarana penunjang (termasuk alsinnak).

Dilihat dari bentuk dan jenisnya, ada dua jenis kelembagaan produksi usaha ternak puyuh, yaitu (1) produk utama, yaitu telur dan daging, dan (2) produk sampingan, ternak afkir dan kotoran-pupuk kandang. Produk telur puyuh menghasilkan: (a) telur segar, (b) telur rebus tawar (berkulit dan tanpa kulit), (c) telur rebus bumbu, (d) telur puyuh sate, (e) telur puyuh sambal, dan (f) telur dadar-goreng. Produk daging puyuh menghasilkan: (a) daging puyuh-karkas, (b) daging puyuh rebus/goreng-tawar, (c) daging puyuh goreng bumbu/bacem, dan (d) daging puyuh abon.

Produksi utama ternak puyuh (telur, daging) dihasilkan oleh dua lembaga produsen, yaitu: (1) Peternak plasma dari perusahaan PT Peksi Gunaraharja (PG) yang menguasai  $\pm 90$  persen produksi bibit,  $\pm 90$  persen produksi telur,  $\pm 100$  persen produksi puyuh pedaging di DIY, dan peternak plasma-privat (non perusahaan), serta (2) Peternak mandiri. Kelembagaan produksi plasma-privat dan peternak mandiri menguasai  $\pm 10$  persen produksi bibit, dan  $\pm 10$  persen produksi telur.

Kelembagaan produksi ternak puyuh pedaging pernah diusahakan oleh perusahaan PG di DIY sebanyak 15.000 ekor pada tahun 2003. Kemudian tahun

2004 tinggal 1000 ekor dan tahun 2005 sudah tidak mengusahakan lagi; kecuali yang masih berjalan adalah proses “hibridisasi” *strain* baru dan perbaikan teknologi perbibitan di tingkat pabrikasi perusahaan. Persoalan utama tidak berkembangnya agribisnis puyuh pedaging adalah tidak berimbangnya biaya korbanan investasi/produksi (input, sekitar Rp. 4000/ekor) dengan penerimaan hasil/produksi (output = 0,8kg/ekor senilai Rp.1800/kg). Oleh karena itu, pihak perusahaan PG yang juga sekaligus bertindak sebagai *breeder*, tersendat memproduksi puyuh pedaging meskipun saat ini ada permintaan pasar daging puyuh. Perusahaan PG sudah berhasil memproduksi varietas puyuh pedaging baru dengan meminimalkan biaya input produksi menjadi sekitar Rp.2000/ekor, walaupun tetap tidak dapat memenuhi permintaan pasar. Konsekuensinya produsen *Breeder lain* (perorangan/ privat) di DIY tidak berani memproduksi jenis puyuh pedaging.

Terkait dengan produksi pakan jadi dan obat/vitamin untuk ternak puyuh, sementara ini tidak ada satu pun kelembagaan yang memproduksi di DIY. Untuk keperluan dan kelangsungan hidup usaha ternak puyuh di DIY harus mendatangkan dari luar wilayah melalui penyalur dan toko-toko sapronak. Dalam hal ini, kecuali pakan jagung, menir dan katul untuk bahan baku pakan ayam buras/ras, bebek, dan sebagainya. Sumber daya pakan lokal dan terutama sumber daya manusianya relatif belum siap sebagai pendukung. Oleh sebab itu, tidak mempunyai kemampuan memproduksi dan memasok bahan baku pakan konsentrat serta obat/vitamin puyuh/unggas secara otonom (paling tidak dalam kurun waktu jangka pendek sampai menengah) meski secara manajerial, sistem birokratisasi pemerintahan daerah sudah melakukan otonomisasi dalam sektor anggaran pembangunan daerahnya.

## **Kelembagaan Pemasaran**

Produksi ternak puyuh hampir seluruhnya dipasarkan di dalam negeri, kecuali telur puyuh kaleng (diekspor ke Jepang dan Singapura). Terdapat dua macam pelaku pemasaran produksi ternak puyuh (telur dan ternak afkir/daging) selepas produksi dari peternak, yaitu (a) Pedagang-perusahaan langsung dan (b) Pedagang-perorangan murni (modal sendiri). Artinya pada kedua kelembagaan pemasaran (P-1) tersebut tidak ada keterlibatan pedagang kaki-tangan atau pedagang-komisioner, kecuali di pasar hilir pada pengolah dan pedagang-asongan telur puyuh-rebus (P-5).

Pemasaran telur segar dari pedagang P-1 ke perusahaan-inti langsung dipasarkan ke pedagang agen (P-2) perusahaan di dua *region* dalam dan luar DIY yaitu melalui (1) P-2 *region* dalam DIY meliputi daerah pusat-pusat pasar kecamatan, pasar kabupaten dan pasar provinsi sekitar DIY, dan (2) P-2 *region* luar DIY, meliputi pedagang agen perusahaan di kabupaten luar provinsi (Bandung, Cirebon, dan daerah kawasan Jalur Pantura), Jakarta (pasar Kramatjati, Jatinegara, Tengger, Cengkareng, dll), Semarang, Malang, Pasuruan, Lampung,

Batam, dan Banjarmasin (Kalimantan). Dari pedagang P-2 tersebut langsung dipasarkan ke pedagang pengecer di pasar-pasar konvensional kabupaten (P-4), pasar modern/super market, serta ke industri pengolah (P-5). Dari pedagang P-4, telur puyuh-konsumsi langsung dipasarkan ke konsumen (P-k). Sementara telur puyuh bibit, sampai saat ini tidak dilepas ke pasar umum.

Pemasaran telur puyuh segar oleh P-1 perorangan melalui dua bentuk, yaitu (1) langsung dijual ke pedagang grosir (P-2) di dua *region* dalam dan luar DIY. Sebagaimana P-1 perusahaan, dari P-1 langsung ke pedagang pengolah atau ke pedagang pengecer (P4/P-5) di pasar-pasar kecamatan dan kabupaten sekitar DIY, dan (2) Pedagang P-1 perorangan langsung memasarkan produksi telur puyuh segarnya ke pedagang-pedagang pengecer (P-5) serta langsung ke industri pengolah, atau langsung ke konsumen (P-k).

Pemasaran daging/ternak puyuh afkir oleh P-1 Perusahaan-Inti langsung ke agen (P-2) Pasar DIY dan ke P-2 Jakarta dalam bentuk daging beku. Dari P-2 tersebut langsung dipasarkan ke P-3 atau P-K. Sementara kelembagaan pemasaran pupuk kandang relatif lebih sederhana, yaitu dari peternak dipasarkan langsung ke konsumen (P-K) petani sayuran 50 persen atau ke pedagang pengumpul (P-1) 50 persen. Kemudian dari P-1 dipasarkan langsung ke pedagang P-K. Karena itu tidak pernah ditemukan di lokasi penelitian adanya pedagang sebagai kaki-tangan atau pedagang-komisioner.

## **Kelembagaan Finansial**

Kelembagaan finansial yang mendukung permodalan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan agribisnis ternak puyuh di DIY paling tidak ada empat lembaga terkait, yaitu (1) Bank (BRI, BCA), (2) Perusahaan/Inti, (3) Pedagang-Inti/perorangan, dan (4) Famili/keluarga dekat. Setiap kelembagaan tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan serta peranan finansial yang berbeda-beda, baik dalam sifat dan bentuk layanan maupun dalam menerapkan persyaratan, aturan main, dan pemberlakuan norma-norma. Petani peternak puyuh di lokasi penelitian, terutama dengan skala kecil sampai menengah tidak ada yang berani meminjam modal usahanya ke lembaga-lembaga tersebut, terutama ke bank. Usaha ternak puyuh dipandang sangat berisiko tinggi, takut gagal panen atau ternaknya kena wabah penyakit yang mematikan seperti terserang virus flu burung, sehingga hutangnya tidak dapat terbayar atau petani takut jika pihak bank sampai menyita asset lahan, rumah atau yang lain milik keluarga. Karenanya, petani lebih menyukai sistem usaha bermitra dengan pihak perusahaan atau pedagang produksi, daripada berusaha ternak sendiri yang segalanya ditanggung sendiri.

Alasan petani ternak puyuh di lokasi penelitian tidak meminjam modal usahanya ke bank, karena selain sistem birokrasinya dipandang merepotkan dan perlu waktu relatif lama, juga peternak takut menambah beban keluarga dengan

mewarisi hutang jika sewaktu-waktu usahanya bangkrut. Karenanya, petani lebih menyukai sistem usaha bermitra-bebas pola KSO (kerjasama operasional) atau dagang-umum dengan para pedagang telur/sapronak atau perusahaan PG. Karena selain hutangnya dapat dibayar secara bertahap dengan produksi telur pada saat panen, juga risiko usaha ternaknya secara tidak langsung menjadi risiko bersama atau sistem risiko berbagi tanggung renteng (*distributed or share of risk system*).

Perhatian pemerintah daerah kabupaten setempat terhadap pembangunan agribisnis peternakan puyuh relatif tidak sebaik terhadap usaha pengembangan ternak sapi yang berada di berbagai desa, serta dalam agribisnis ternak ayam buras. Mungkin saja, agribisnis ternak puyuh dipandang sudah ada pihak swasta atau perusahaan yang menanganinya dengan baik. Selama ini juga tidak ada persoalan yang berarti di dalam kelembagaan kerjasama kemitraan, sehingga pihak pemerintah merasa tidak perlu ikut campur didalamnya.

Berbeda halnya dengan persoalan dan perhatian Pemerintah Daerah terhadap pengembangan usaha agribisnis komoditas ternak sapi, dimana sebagian petani telah memanfaatkan fasilitas kredit dari bank pemerintah atau bank swasta. Demikian juga bantuan kredit dari Perusahaan pemerintah/BUMN, baik secara berkelompok maupun secara perorangan, sehingga pihak Pemerintah (Kantor Dinas Peternakan) ikut campur menanganinya dan melakukan pemantauan dan pembinaan dengan mudah.

### **Kelembagaan Kemitraan**

Terdapat tiga bentuk kemitraan pada usahaternak puyuh di Provinsi Yogyakarta, yaitu (1) Kemitraan murni, (2) Kemitraan semi plus, dan (3) Kemitraan bebas. Ada beberapa fasilitas dari pihak inti yang diberikan dan diberlakukan sama terhadap semua peternak plasma ketiga jenis usaha kemitraan dengan perusahaan, diantaranya bimbingan dan informasi seputar agribisnis perpujukan secara berkala melalui media publikasi majalah Warta Peksi pada setiap penerbitan.

Kemitraan murni adalah suatu bentuk usaha kemitraan Inti-Plasma, antara pihak kelompok peternak dengan perusahaan mitra. Dalam hal ini perusahaan mitra bertindak sebagai inti melakukan kontrak usaha dengan kelompok mitra sebagai anggota plasma. Dalam pola kemitraan inti-plasma yang menjadi pihak inti adalah perusahaan PT. PG yang berkantor pusat di Dusun Ngasem, Kelurahan Selomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta. Pola ini hanya ada/terjadi pada peternak plasma binaan Inti-perusahaan PT. PG (kemitraan-1). Sedangkan jenis usaha pola Kemitraan-2 dan kemitraan-3 ada pada peternak plasma binaan Inti-perusahaan PT. PG dan pada peternak plasma binaan Inti-perorangan/pedagang.

Pada saat musim normal, kemitraan murni hanya berjalan pada usaha ternak puyuh telur-bibit yang jumlahnya kurang dari 1,5 persen dari jumlah

keseluruhan petani plasma. Sedangkan pada musim-musim ramai (permintaan telur-konsumen meningkat tajam), pola kemitraan murni diterapkan juga pada usaha ternak puyuh telur-konsumsi. Ciri lain sebagai pembeda dengan kemitraan-semi plus, adalah (a) anggota plasma hanya peternak-peternak “keluarga abdi dalem” (famili keluarga elit perusahaan) dan peternak-peternak plasma tertentu pilihan Inti. Pada jenis kemitraan ini, petani plasma tidak perlu mengeluarkan modal apapun di luar tenagakerja dan kandang dan semua ongkos produksi ditanggung oleh pihak inti. Peraturan dan norma yang berlaku selama bermitra berlaku khusus dan lebih ketat disebutkan secara tertulis dalam surat perjanjian kerjasama. Harga produksi ditentukan secara kontrak satu kali per tahun. Keistimewaan lain adalah seluruh produksi kecuali pupuk-kandang, harus dijual ke pihak inti dan peternak mendapatkan beberapa insentif khusus dari pihak inti.

Pada bentuk kemitraan-2 atau kemitraan semi plus, anggotanya lebih dari 95 persen ditetapkan dengan persyaratan dan peraturan-peraturannya yang lebih longgar daripada bentuk/pola kemitraan-1. Pada pola ke-2, peternak plasma harus memiliki modal awal (*cash*), sebab untuk pengadaan bibit (DOQ) dan pakan konsentrat selama pra-produksi (jenis BR 501) harus dibeli dengan kontan. Saprotrak dan produksi telur harus dibeli dan dijual ke pihak inti, kecuali produk ternak afkir boleh dipasarkan ke Inti atau ke pedagang non-inti. Ciri khusus adalah harga diumumkan berkala mingguan melalui petugas lapangan seksi pemasaran. Bentuk pola usaha kemitraan-2 tersebut saat ini lebih diminati oleh petani-peternak, sehingga meningkat permintaannya ke pihak Inti PT. PG. Tapi karena sebagai alasan teknis, pihak perusahaan belum bisa mengabdikan permintaan petani.

Pada bentuk kemitraan-3, Kemitraan semi-biasa atau kemitraan bebas yang saat ini jumlahnya mencapai sekitar 10 persen dari total petani ternak puyuh di Provinsi DIY, memberlakukan persyaratan dan peraturan-peraturannya lebih bebas dan lebih leluasa daripada bentuk/pola kemitraan lain. Pada pola usaha kemitraan-3, peternak plasma jenis ini dituntut harus memiliki modal usaha (*cash*) sendiri, sebab untuk pengadaan seluruh saprotrak, mulai dari bibit (DOQ) sampai peralatan peti kemas telur harus dibeli dengan kontan. Sementara seluruh keperluan saprotrak dan produksi utama maupun produksi sampingan boleh membeli dan menjual dari dan ke pedagang lain secara bebas, tidak diharuskan mesti ke pihak Inti. Karenanya, bimbingan dan berita berkala Warta-Peksi tidak diberikan oleh pihak Inti-perusahaan. Salah satu kelebihan pola kemitraan-3 adalah mendapatkan insentif harga beli saprotrak dan harga jual produksi lebih tinggi dari pada harga atau insentif yang diberlakukan terhadap petani ternak puyuh jenis kemitraan-2 dan kemitraan-1. Pola Kemitraan-3 tersebut saat ini menurun populasinya, terutama setelah adanya badai krisis ekonomi 1998 dan terlebih lagi setelah adanya wabah serangan penyakit flu burung pada tahun 2003. Jumlah peternak yang masih bertahan, hanya sekitar 10 sampai 25 persen dari jumlah peternak puyuh di DIY. Kondisi ini terutama diakibatkan karena faktor

kesulitan dan keterbatasan pemilikan modal kapital yang dibutuhkan oleh peternak untuk melakukan usaha ternak.

### **Dampak Kinerja Kelembagaan terhadap Produksi dan Pendapatan**

Secara umum pengaruh kinerja kelembagaan yang ada pada agribisnis ternak burung puyuh terhadap produksi dan pendapatan setiap pelaku bisnis di lokasi penelitian cukup baik. Dari respon setiap pelaku bisnis di berbagai bidang (pihak peternak, pedagang, industri pengolah, perusahaan/inti, dan pejabat Disnak terkait), menyatakan saat ini sudah mulai bangkit dari keterpurukannya. Hal ini ditandai dengan adanya permintaan pasar setelah mengalami kelesuan sejak akhir tahun 2003, dimana terjadi wabah serangan penyakit flu burung yang menyerang ternak puyuh. Dari pihak pelaku pedagang-privat dan pedagang-perusahaan menyatakan bahwa, permintaan pasar telur puyuh di daerah sentra konsumen sudah mulai meningkat dan belum dapat terpenuhi. Artinya, meskipun produksi dan pendapatan pelaku bisnis ternak puyuh sekarang sudah ada peningkatan, tapi masih belum memenuhi peningkatan pasar.

Pengaruh dari respon pasar yang mulai positif maka secara langsung atau tidak langsung, dapat memberikan dampak positif terhadap kegairahan usaha, peningkatan keuntungan usaha dan pendapatan para pelaku bisnis burung puyuh. Hal ini telah dirasakan oleh peternak, pedagang, industri pengolah telur, perusahaan/inti, dan pelaku yang lainnya.

Secara kuantitatif dampak langsung terhadap produksi dan pendapatan keluarga peternak puyuh cukup signifikan. Berdasarkan hasil analisis data primer membuktikan bahwa, rataan produktivitas telur yang dicapai petani adalah 75 persen per tahun atau 272,61 butir/ekor/tahun, dan sekitar 48 persen pendapatan keluarga responden berasal dari pendapatan usaha ternak puyuh. Artinya usaha ternak puyuh mampu menyumbang sekitar Rp.12,73 juta/tahun dari rataan total pendapatan keluarga responden sebesar Rp.26,60 juta/tahun. Tingkat *fisibilitas* usaha ternak puyuh pada saat itu termasuk cukup baik, seperti ditunjukkan oleh nilai rasio R/C yang mencapai 1,34 (total), 1,40 untuk usaha mandiri/bebas, dan 1,34 untuk usaha puyuh kemitraan. Dengan demikian usaha ternak puyuh saat ini mampu memberikan pendapatan (kotor) sekitar 34 sampai 40 persen dari total dana yang diinvestasikan (Yusdja *et al.*, 2005).

Bila ditinjau dari bentuk usaha, ternyata pendapatan usaha ternak puyuh secara bebas/mandiri lebih menguntungkan dari pada usaha ternak kemitraan, yaitu masing-masing mencapai sekitar Rp. 8,107 juta sampai Rp. 9,56 juta/tahun/1000 ekor dibanding Rp.7,12 juta sampai Rp. 8,561 juta/tahun/1000 ekor. Tingkat *fisibilitas* tergolong cukup baik, seperti ditunjukkan oleh nilai R/C per skala usaha 1.000 ekor puyuh per tahun, yaitu masing-masing 1,43 untuk usaha bebas/mandiri, dan 1,37 untuk usaha kemitraan (Yusdja *et al.*, 2005).

Dampak langsung terhadap para pedagang pengumpul telur/pedagang telur segar yang memasarkan produknya di sekitar daerah pusat-pusat kota kabupaten di DIY memperoleh margin keuntungan sekitar Rp. 25 - Rp. 50/butir. Begitu juga dampak positif terhadap para pedagang/pengolah daging puyuh, pedagang-asongan, pengelola Restoran dan warung-warung makan, dan sebagainya. Karenanya tidak mustahil, bila dampak ekonomi dari agribisnis ternak burung puyuh di daerah lokasi penelitian (Kabupaten Sleman, Bantul, DIY) sudah mulai bangkit dengan semangat menata kembali usaha ternak puyuhnya masing-masing.

## **DUKUNGAN PEMERINTAH**

### **Program yang Telah Dilaksanakan Pemerintah**

Industri peternakan puyuh, di satu sisi belum menjadi persoalan komoditas "politik" nasional dan belum mengusik kepentingan individu/kelompok "elit penguasa" tertentu. Sedangkan di sisi lain, kegiatan ini belum sampai meresahkan kepentingan usaha masyarakat pelaku bisnis ternak puyuh, baik di daerah sentra di DIY maupun di daerah lain sehingga masih pantas bila disebut sebagai bisnis ternak yang "stabil". Karenanya cukup beralasan, bila pemerintah pusat dan daerah merespon dengan suatu kebijakan yang cukup proporsional dan "adil" terhadap kinerja pengembangan agribisnis ternak burung puyuh tersebut. Netralitas kebijakan yang nampak "ngambang" ini, di lapangan nampaknya mengalir sejalan dengan aliran alami kegiatan perpuyuhan itu sendiri.

Dalam hal ini Pemerintah Daerah juga Pemerintah Pusat bersifat "pasif", yaitu hanya cukup memberikan dukungan sebagai fasilitator, mediator, dan stimulator tertentu, baik terhadap perusahaan maupun peternak sepanjang hal tersebut diminta dan diperlukan oleh para pelaku bisnis ternak puyuh. Kecuali pada program pelayanan dan penanganan kesehatan hewan seperti pada kasus vaksinasi dan pemberantasan penyakit flu burung melalui pemberian pelayanan secara gratis. Di lapangan terbukti bahwa data dan informasi, terlebih lagi program-program yang berkaitan dengan industri perpuyuhan pada lembaga formal terkait, sampai sekarang relatif masih sulit dan cenderung tidak/belum tersedia. Kalau pun data tersebut ada dan tersedia, masih jauh dari memadai untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi masyarakat pengguna.

Satu-satunya lembaga yang dapat memberikan informasi/data yang berkaitan dengan ternak puyuh adalah lembaga nonformal sebagai pelaku bisnis langsung di bidang agribisnis ternak puyuh, seperti kelompok petani ternak puyuh, pedagang, pembibit, perusahaan/inti dan sejenisnya. Pada lembaga-lembaga tersebut ada informasi atau data-data teknis belum terdokumentasikan dengan baik. Karena itu secara kongkrit, data dan informasi yang berkaitan dengan berbagai



program pengembangan agribisnis ternak puyuh yang telah dilaksanakan oleh pemerintah sampai saat ini relatif tidak tersedia.

Kondisi tersebut memberikan indikasi dan sekaligus memberikan gambaran bahwa perhatian pemerintah terhadap industri perpuyuhan relatif masih sangat terbatas. Menurut informasi dari Sub Dinas Peternakan, Kantor Dinas Pertanian Provinsi DIY dan Kabupaten Sleman (2003, 2004), pembinaan yang pernah diberikan Pemerintah Daerah adalah diantaranya menyelenggarakan temu usaha kemitraan burung puyuh yang diselenggarakan pada 7 Oktober 2003 di Wisma LPP Demangan, Yogyakarta. Pertemuan dihadiri oleh 30 orang pengusaha peternak burung puyuh, dalam rangka memfasilitasi pertemuan antara perusahaan inti, peternak plasma dan instansi pembina dalam usaha budidaya burung puyuh.

Begitu juga bentuk program pemerintah pusat yang sejak tahun 2003 dirancang dalam bentuk manajemen bantuan langsung ke masyarakat (BLM) melalui kelompok tani ternak. Program khusus BLM untuk pengembangan agribisnis burung puyuh di daerah Provinsi Yogyakarta dalam kurun waktu lima tahun terakhir memang tidak ada sama sekali. Lain halnya dengan bantuan program untuk jenis ternak sapi potong sapi perah, dan ayam buras (juga ada sedikit untuk ternak domba), dalam kurun waktu yang sama tercatat ada program BLM di sekitar 47 kelompok tani ternak (se Provinsi DIY) dengan dana yang tersalur mencapai sekitar Rp.1,428 miliar (2000), Rp.2,20 miliar (2001), Rp.1,705 miliar (2002), Rp.1,308 miliar (2003), Rp.1,39 miliar (2004). Pada Tahun Anggaran 2005, BLM dalam program pengembangan agribisnis ternak sapi potong mencapai Rp.0,247 miliar yang rencananya akan didistribusikan ke 2 kelompok tani ternak di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul (Direktorat Pengembangan Peternakan, 2005).

## PENUTUP

Secara umum kegiatan usaha peternakan puyuh telah berdampak positif bagi penumbuhan ekonomi masyarakat di perdesaan, mengingat usaha peternakan tersebut dijalankan oleh sebagian besar masyarakat, sekalipun masih dalam pola tradisional dan skala rumah tangga. Sistem dan peluang pasar yang masih terbuka juga telah memberikan dorongan bagi usaha peternakan untuk bisa bertahan menjadi alternatif sumber pendapatan masyarakat perdesaan yang mengusahakannya.

Adanya beberapa bentuk usaha peternakan yang sekaligus menjadi mitra kerja dan mitra usaha dalam kaitan usaha peternakan yang dijalankan, telah memberi kepastian iklim usaha sehingga terus berkembang menjadi satu kekuatan pasar produksi yang sekaligus menjadi kekuatan pasar konsumsi bagi produk usaha peternakan puyuh yang dihasilkan. Terlepas dari kekurangan dan kelebihan sistem yang dijalankan melalui bentuk kemitraan yang menjadi pilihan para

peternak skala rumah tangga, pola seperti ini juga sangat membantu memberikan peluang berusaha di subsektor peternakan yang dapat dilakukan oleh masyarakat diperdesaan.

Dukungan pemerintah khususnya dari Pemerintah Daerah serta para pelaku di bidang peternakan sekalipun dengan kapasitas yang masih terbatas telah mampu menjadikan usaha peternakan puyuh di DI Yogyakarta khususnya, menjadi alternatif kegiatan ekonomi yang secara luas telah melibatkan berbagai pelaku baik di tingkat produksi maupun di tingkat konsumen melalui penciptaan pasar produk yang terdistribusi.

Penumbuhan kembali usaha peternakan puyuh pasca serangan *Avian influenza (AI)* yang mengakibatkan sebagian besar peternak mengalami kebangkrutan produksi, harus menjadi prioritas perhatian semua pihak. Akibat kerugian tersebut sangat berdampak pada kegiatan perekonomian masyarakat secara luas. Peran pemerintah dengan lembaga keuangan serta dinas yang berkompeten lebih diutamakan dalam rangka penumbuhan kembali kegiatan usaha peternakan puyuh bersama-sama dengan kelembagaan terkait lainnya, seperti pada situasi sebelum terjadinya wabah AI tersebut. Dengan demikian, selain peternak mendapatkan kemudahan permodalan untuk melakukan kegiatan usaha, juga secara bersama-sama melakukan pencegahan secara intensif-preventif terhadap kemungkinan terjadinya serangan wabah penyakit tersebut di kemudian hari. Jika dapat dilakukan, maka secara bersama-sama dapat mengurangi risiko serta dampak ekonomi yang cukup besar, sekaligus dapat menumbuhkan kembali sumber perekonomian masyarakat melalui usaha ternak puyuh rakyat di wilayah perdesaan DI Yogyakarta.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agromedia. 2002. Puyuh Si Mungil Penuh Potensi. Jakarta
- Andang, Isman dan Anto. 2002. Puyuh Menggeliat, Breeding Belum Siap. Poultry Indonesia. Juli 2002. p10-15. Jakarta.
- Anonimous. 2004. Profil Peternakan Kabupaten Sleman.
- Anonimous. 2004. Laporan Triwulanan Satu Tahun 2004 Bidang Peternakan Kabupaten Sleman
- Anonimous. 2004. Renstra (Rencana Strategis) Kabupaten Sleman.
- Anonimous. 2003. Laporan Tahunan Bidang Peternakan Kabupaten Sleman.
- Direktorat Pengembangan Peternakan. 2005. Program BLM Subsektor Peternakan. Jakarta
- Hartono, Tirto. 2004. Permasalahan Puyuh dan Solusinya. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Poultry Indonesia. 2004. Februari No. 286. Potensi Burung Puyuh.

- Poultry Indonesia. 2004. No.290 Juni 2004 : Puyuh, Bisnis Baru Peternak Aceh.
- Poultry Indonesia. 2002. No. 267 Juli 2002. Puyuh Bisnis Unggas Alternatif.
- Poultry Indonesia. 2005. Juni 2005. Telur-telur Bermerk.
- Yusdja. Y, *dkk.* 2005. Pengembangan Model Kelembagaan Agribisnis Ternak Unggas Tradisional (Ayam Buras, Itik dan Puyuh). Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.